

PLURALISME KEAGAMAAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM TRADISIONAL

(Studi Sosiologis Filosofis tentang Pluralisme pada Pondok Pesantren di Kabupaten Bone)

Religious Pluralism in Traditional Islamic Educational Institutions Philosophical Sociological Study of Pluralism in Pondok Pesantren (Islamic Boarding School) in Bone Regency

Oleh: Afifuddin*

*Dosen pada STAIN Watampone, Kab. Bone
Alamat Kantor: Jl. HOS Cokroaminoto, Watampone
Email: afifuddinharisah@Stvahoo.com

Abstrak

Pesantren dalam peranannya sebagai social change adalah lembaga yang dapat mengubah struktur-struktur ide dan pemikiran dalam masyarakat. Karena itu pesantren dapat menjadi institusi yang penting dalam pembentukan masyarakat pluralis dengan terlebih dahulu mengembangkan hal tersebut dalam lingkungannya sendiri. Penelitian yang dilakukan di pesantren al-Junediyyah Biru dan pondok pesantren al-Ikhlas Ujung dengan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian ini menunjukkan di dua Pondok Pesantren di Kabupaten Bone telah dikembangkan pluralisme dalam konteks gagasan, ide, sikap dan pemikiran kiai, ustaz, dan para santri. Saran yang efektif untuk penanaman nilai ini adalah melalui proses pembelajaran dan pendidikan. Pola hidup dan tradisi keilmuan yang akrab dengan perbedaan dan kemajemukan pemikiran pada kenyataannya menumbuhkan budaya kepesantrenan yang pluralis.

Kata Kunci: *Pesantren, Pluralisme, Perubahan Sosial, Islam Tradisional*

Abstract

Pesantren in the role of social change is an institution that can alter the structures of ideas and thoughts in the society. Therefore, schools can become an important institution in the building of a pluralist society by first developed it in their own environment. Research conducted at Pesantren -Junediyyah Biru and Pondok Pesantren al-Ikhlas Ujung with a qualitative method with a phenomenological approach. These results indicate that two Pondok pesantren in Bone has developed in the context of the pluralism of ideas, ideas, attitudes and thoughts kiai, ustads, and the students. Effective means for the cultivation of these values is through the process of learning and education. Lifestyle and traditions of science are familiar with the differences and diversity of thought, in fact, foster a pluralist culture of pesantren.

Keywords: *Pesantren, Pluralism, Social Change, Traditional Islam*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pluralitas adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan ini. Allah menciptakan alam ini di atas sunnah pluralitas dalam sebuah kerangka kesatuan. Isu pluralitas setua usia manusia dan selamanya akan ada selama kehidupan belum berakhir, hanya saja bisa terus menerus berubah, sesuai perkembangan zaman.

Sejak awal terbentuknya, Negara Indonesia berdiri di atas keragaman budaya dan agama. Keberadaan agama-agama yang dianut masyarakat Indo-

nesia memberikan warna tersendiri yang menentukan corak dan karakteristik bangsa Indonesia, baik pada ranah kebijakan politik, hukum, struktur sosial dan pola inter-relasi dalam masyarakat. Kemajemukan ini pada satu sisi merupakan anugerah yang berpotensi memberi penguatan sosial (*social enrichment*), namun pada sisi lain justru dapat menjadi 'bom waktu' yang berpotensi melahirkan berbagai konflik antar agama dan etnis.

Kemajemukan dan keragaman agama dan budaya di Indonesia, secara sosiologis-antropologis, adalah realitas sosial yang niscaya. Agar modal sosial tersebut tidak kontra-produktif bagi penciptaan tatanan

kehidupan berbangsa yang damai dan harmonis, diperlukan upaya untuk menumbuh-kembangkan kesadaran akan pluralitas agama yang dimilikinya, sehingga potensi positif yang terkandung dalam keragaman tersebut dapat teraktualisasi secara benar dan tepat. Hal yang paling penting adalah memberikan pemahaman yang mendalam, khususnya kepada generasi muda, tentang pentingnya mengedepankan toleransi dan kebersamaan dalam kondisi pluralitas tersebut.

Pendidikan, terutama pendidikan agama, merupakan salah satu wahana yang paling tepat untuk membangun kesadaran akan pluralitas agama serta membentuk corak dan sikap keberagamaan yang inklusif, jauh dari ekstremitas dan anarkisme akibat perbedaan-perbedaan ideologis. Karena, sebagai proses alih nilai (*transfer of value*) dan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*), pendidikan agama berperan dalam mentransmisikan pengetahuan agama dan nilai-nilai yang signifikan bagi pengembangan watak anak didik tentang bagaimana bersikap terhadap realitas kehidupan yang secara keagamaan bersifat pluralistik tersebut.

Dalam hal ini, pondok pesantren, sebagai basis pendidikan Islam yang telah menjadi bagian dari sejarah dan budaya Islam Indonesia, tentunya diharapkan dapat memberikan pembinaan moralitas generasi bangsa yang terbuka, egaliter, dan inklusif, jauh dari kecenderungan radikalisme dan fundamentalisme yang terbukti lebih banyak *mudlarat-nya* ketimbang maslahatnya. Pola pembelajaran yang diselenggarakan pondok pesantren, khususnya yang dikelola oleh kyai NU, berdasarkan pada pengkajian kitab-kitab kuning yang sarat dengan keragaman pendapat dan perspektif para ulama klasik. Ini pada gilirannya membentuk paradigma pluralistik pada diri santri untuk menerima perbedaan dan menyikapinya dengan jiwa yang besar.

Beranjak dari fenomena di atas, sangat perlu kiranya melakukan studi penelitian yang serius untuk mengungkap sejauhmana pemahaman dan sekaligus penerimaan (atau mungkin penolakan)'kalangan sarungan' di lingkungan pesantren terhadap ide dan pemikiran pluralisme, yang dituduhkan sebagai komoditas Barat yang sekuler. Setidaknya ada dua target pokok yang ingin dicapai dalam studi ini, yaitu menguji urgensi dan akseptabilitas pluralisme sebagai sikap beragama pada kalangan muslim

tradisional, dan sekaligus mencoba menepis *stereotype* yang dibangun oleh sebagian jurnalis Barat bahwa pesantren adalah 'sarang' dan 'pabrik' teroris.

Rumusan Masalah

Penciptaan masyarakat Indonesia yang toleran dan demokratis dalam lingkungan kehidupan beragama yang plural tidak akan mungkin diwujudkan tanpa peranan pendidikan agama yang berwawasan pluralistik. Pesantren, dalam kaitan ini, sangat dimungkinkan memunculkan sikap dan pemahaman keberagamaan yang terbuka, toleran, egaliter dan dialogis dalam merespon perbedaan-perbedaan.

Dari uraian di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana diskursus tentang pluralisme dalam konteks Islam Indonesia?
2. Bagaimana pluralisme keagamaan di pondok pesantren di Kabupaten Bone?

Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang dan permasalahan di atas, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk memahami konsepsi pluralisme dalam konteks Islam Indonesia
- b. Untuk mengetahui pluralisme keagamaan yang tumbuh dan berkembang di lingkungan pondok pesantren di Kabupaten Bone.

TINJAUAN PUSTAKA

Pluralisme dalam Konteks Keagamaan

Budhy Munawar Rachman, dalam salah satu tulisannya mengemukakan tiga pengertian pluralisme kontemporer yang telah dikembangkan, dan dijadikan dasar analisis dalam teologi maupun sejarah Islam. Ketiga pengertian itu adalah:

Pertama, pluralisme adalah *keterlibatan aktif* dalam keragaman dan perbedaannya, untuk membangun peradaban bersama. *Kedua*, pluralisme dengan pengertian yang pertama, berarti meng-*andaikan* penerimaan toleransi aktif terhadap yang lain. Tetapi pluralisme *melebihi toleransi*. Pluralisme meniscayakan pengenalan secara mendalam atas yang lain itu, sehingga ada *mutual understanding* yang membuat satu sama lain secara aktif mengisi toleransi itu dengan hal yang lebih konstruktif, untuk tujuan yang pertama, yaitu aktif bersama membangun peradaban.

Ketiga, berdasarkan pengertian kedua, maka pluralisme bukan *relativisme*. Pengenalan yang mendalam atas yang lain akan membawa konsekuensi mengakui sepenuhnya nilai-nilai dari kelompok yang lain.¹

Ketiga pengertian pluralisme ini, secara teologis ini berarti bahwa manusia harus memang harus menangani perbedaan-perbedaan mereka dengan cara terbaik (*fastabiq al-khairdt*, "berlomba-lomba dalam kebaikan", dalam istilah al-Qur'an) secara maksimal, sambil menaruh penilaian akhir mengenai kebenaran kepada Tuhan. Karena tidak ada satu carapun yang bisa dipergunakan secara objektif untuk mencapai kesepakatan mengenai kebenaran yang mutlak ini.

Menurut Syamsul Arifin dalam makalahnya yang dilangsir salah satu situs, ada dua hal yang harus ditekankan dalam memahami hakikat pluralisme agama. *Pertama*, pengakuan sekaligus penerimaan terhadap keragaman termasuk dalam agama. *Kedua*, perlunya mengembangkan relasi damai dengan kelompok agama lain. Bahwa masing-masing agama terdapat perbedaan, terutama pada ranah eksoteriknya, namun belum tentu pada ranah esoteriknya.²

Dalam konteks keindonesiaan, meski bukan hal yang baru kajian terhadap kemajemukan tetap merupakan hal yang urgen untuk dikembangkan. Dalam kata pengantarnya, M. Amin Abdullah mengatakan, keanekaragaman (pluralitas) agama yang hidup di Indonesia, termasuk di dalamnya keanekaragaman paham keagamaan adalah merupakan kenyataan historis yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Pluralisme ada dan diperlukan bukan hanya sekadar untuk tujuan kebaikan negatif (*negative good*), hanya ditinjau dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme. Pluralisme akan dipahami sebagai pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bound of civility*). Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia.³

Berdasar dari uraian di atas, pluralisme agama yang merupakan subyek penelitian ini adalah pandangan atau sikap yang didasari oleh pemahaman yang mendalam tentang keragaman (pluralitas) agama

dan keyakinan, serta kesediaan untuk menerima keragaman tersebut, yang pada gilirannya menciptakan kedamaian dan toleransi dalam hubungan antar agama dan keyakinan. Sikap keberagaman ini diasumsikan eksis dan tumbuh dalam sistem relasi edukatif di pondok pesantren.

Pendidikan Islam dan Wacana Pluralisme Agama

Melihat peran pentingnya sikap pluralisme untuk bisa mengakui dan menghormati perbedaan (pluralitas) dan sikap seperti ini ternyata memiliki landasan teologis dari Al-Qur'an maka, teologi pluralisme seperti ini sangat penting untuk ditekankan pada peserta didik melalui pendidikan agama. Untuk itu, maka pendidikan sebenarnya masih dianggap sebagai instrumen penting. Sebab, pendidikan sampai sekarang masih diyakini mempunyai peran besar dalam membentuk karakter individu-individu yang dididiknya, dan mampu menjadi *guiding light* bagi generasi muda penerus bangsa. Dalam konteks inilah, pendidikan agama sebagai media penyadaran umat perlu membangun teologi inklusif dan pluralis, demi harmonisasi agama-agama yang telah menjadi hal yang urgen sekarang ini.

Hal tersebut dengan suatu pertimbangan, bahwa salah satu peran dan fungsi pendidikan agama diantaranya adalah untuk meningkatkan keberagaman peserta didik dengan keyakinan agama sendiri, dan memberikan kemungkinan keterbukaan untuk mempelajari dan mempermasalahkan agama lain sebatas untuk menumbuhkan sikap toleransi.⁴ Ini artinya, pendidikan agama pada prinsipnya, juga ikut andil dan memainkan peranan yang sangat besar dalam menumbuh-kembangkan sikap-sikap pluralisme dalam diri siswa.

Melihat realitas semakin banyak konflik, kekerasan, dan bahkan kekejaman yang dijalankan atas nama agama, sebagaimana tersebut di atas, seharusnya yang menjadi tujuan refleksi atas pendidikan agama adalah mampu melakukan transformasi kehidupan beragama itu sendiri dengan melihat sisi ilahi dan sosial-budayanya. Pendidikan agama harus mampu menanamkan cara hidup yang lebih baik dan santun kepada peserta didik. Sehingga sikap-sikap seperti saling menghormati, tulus, dan

¹ Budhy Munawar Rachman, *Membicarakan Kembali Pluralisme Agama (Diskursus Pemikiran Agama dan Kemajemukan Agama)*, <http://id.acehinstitute.org>, diakses tanggal 25 April 2010

² Syamsul Arifin, *Konstruksi Wacana Pluralisme Agama di Indonesia*, <http://repository.umm.ac.id/627/1/2007>, diakses tanggal 24 April 2010

³ M. Amin Abdullah. 1999, *Relevansi Studi Agama di Era Pluralisme Agama*, Kata Pengantar buku yang ditulis Muhammad Sabri, *Keberagaman yang Saling Menyapa: Perspektif Filsafat Perennial*. Bigraf, Yogyakarta, h. ix-x.

⁴ Jhon Sealy.1986, *Religious Education Philosophical Perspective*. London: George Allen & Ullin, 1986, h. 43-44.

toleran terhadap keanekaragaman agama dan budaya dapat tercapai di tengah-tengah masyarakat plural.

Pendidikan Islam yang dijiwai oleh nilai-nilai pluralisme perlu digagas dengan mengedepankan beberapa hal, yaitu ; *pertama* pendidikan Islam harus mempunyai karakter sebagai lembaga pendidikan umum yang bercirikan Islam. Artinya, di samping menonjolkan pendidikannya dengan penguasaan atas ilmu pengetahuan, namun karakter keagamaan juga menjadi bagian integral dan harus dikuasai serta menjadi bagian dari kehidupan siswa sehari-hari.

Kedua; Pendidikan Islam juga harus mempunyai karakter sebagai pendidikan yang berbasis pada pluralitas. Artinya, bahwa pendidikan yang diberikan kepada siswa tidak menciptakan suatu pemahaman yang tunggal, termasuk di dalamnya juga pemahaman tentang realitas keberagamaan. Kesadaran pluralisme merupakan suatu keniscayaan yang harus disadari oleh setiap peserta didik.

Ketiga; Pendidikan Islam harus mempunyai karakter sebagai lembaga pendidikan yang menghidupkan sistem demokrasi dalam pendidikan. Sistem pendidikan yang memberikan keluasaan pada siswa untuk mengekspresikan pendapatnya secara bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan ditempuh lewat pendekatan fenomenologis dengan mengacu pada analisis sosiologis-filosofis. Analisis sosiologis dimaksudkan sebagai pengkajian yang berupaya menjelaskan persepsi-persepsi yang berkembang dalam interaksi sosio-edukatif dalam lingkungan institusi pendidikan Islam tradisional, dalam hal ini pesantren-pesantren di wilayah Kabupaten Bone.

Sedang analisis filosofis dimaksudkan sebagai metode analisis kritis, mendalam dan sistematis dalam mengkaji suatu konsep, paham keyakinan dan ide pemikiran serta nilai-nilai substansial. Pluralisme merupakan paham dan konsepsi sikap dalam konteks hubungan antar manusia, baik dalam skala individual maupun sosial antar kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus Pluralisme dalam Konteks Islam dan KelIndonesiaan

Pada saat ini sebagaimana dikatakan oleh Alwi Shihab dalam *Islam Inklusif* bahwa umat beragama dihadapkan kepada serangkaian tantangan baru yang tidak terlalu berbeda dengan apa yang pernah dialami sebelumnya. Pluralisme agama, konflik intern atau antar agama adalah fenomena nyata.⁵ Pluralisme agama dalam hal ini, harus benar-benar dapat dimaknai sesuai dengan akar kata serta makna sebenarnya. Hal itu merupakan upaya penyatuan persepsi untuk menyamakan pokok bahasan sehingga tidak akan terjadi "*misinterpretation*" maupun "*misunderstanding*".

Pertama, bertolak dari akar kata yang pertama yaitu pluralisme. Kata pluralisme berasal dari bahasa Inggris yang berakar dari kata "*plural*" yang berarti banyak atau majemuk. Atau meminjam definisi Martin H. Manser dalam *Oxford Learner's Pocket Dictionary*: "*Plural (form of a word) used of referring to more than one*". Kata "*plural*" mempunyai akar kata sifat yaitu "*Plurality*" yang menurut *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* (second edition 1963, Oxford University Press, London) berarti "*state of being plural*". Sedangkan makna dari *pluralism* itu sendiri masih menurut Kamus *The Advanced* berarti: "*The holding of more than one office, especially in the church, at one time*". Sedangkan dalam *Kamus Ilmiah Populer*, pluralisme berarti: "*Teori yang mengatakan bahwa realitas terdiri dari banyak substansi*".

Dengan demikian dapat diambil pengertian yang mendasar tentang pluralisme agama sebagai bentuk kemajemukan, keragaman dalam beragama, dan itu merupakan sebuah realita yang harus diterima. Seseorang baru dapat dikatakan menyandang sifat tersebut apabila ia dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, pengertian pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan, dalam kebhinekaan.⁷

Pluralism berarti "*jama*" atau lebih dari satu. Pluralism dalam bahasa Inggris menurut Anis Malik Thoha

⁵ Alwi Shihab. 1997, *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan, 1997), hal. 39

⁶ Martin H Marsen,. 1999, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Oxford University, Second Edition

⁷ Alwi Shihab, *Op Cit*, hal. 41

mempunyai tiga pengertian. *Pertama*, pengertian kegerejaan: (a) sebutan untuk orang yang memegang lebih dari satu jabatan dalam struktur kegerejaan, (b) memegang dua jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat kegerejaan maupun non kegerejaan. *Kedua*, pengertian filosofis; berarti sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasarkan lebih dari satu. Sedangkan *ketiga*, pengertian sosio-politis: adalah suatu sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut.⁸

Dari definisi diatas, maka dapat di tarik suatu pengertian bahwa "pluralitas agama" adalah kondisi hidup bersama (koeksistensi) antar agama (dalam arti yang luas) yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama.

Menurut M. Amin Abdullah, keaneragaman (pluralitas) agama yang hidup di Indonesia, termasuk di dalamnya keanekaragaman paham keagamaan adalah merupakan kenyataan historis yang tidak dapat disangkal oleh siapapun.⁹ Sebagai sebuah fakta historis-sosiologis, pluralitas menurut Budhi Munawar Rachman, tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekedar kebaikan negatif (negative good), hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme. Pluralisme akan dipahami sebagai pertalian sejati

kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bound of civility*). Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme perawatan, pengawasan dan keseimbangan yang dihasilkannya¹⁰.

Sejarah merupakan bukti nyata bahwa bangsa Indonesia -mulai kerajaan majapahit, mataram, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Islam Demak sampai pada lahirnya Indonesia- merupakan bangsa kaya akan budaya, suku, bahasa daerah, keyakinan dan agama.¹¹ Masyarakat telah menyakini sesuatu yang berada di luar diri manusia dan berpengaruh terhadap hidup manusia yaitu kepercayaan animisme, dinamisme dan agama Hindu dan Budha yang datang dari India. Islam masuk dengan ajaran-ajaran pembebasan, pencerahan, tidak ada perbedaan kasta dan dengan damai Islam tersebar di Indonesia sedangkan di lain pihak agama Budha dan Hindu telah mewarnai kebudayaan masyarakat saat itu. Dan proses pertemuan antara kebudayaan-kebudayaan yang berkembang di masyarakat dengan kebudayaan yang datang kemudian tidak dapat dihindari. Hal ini juga terjadi pada proses penyebaran agama, yang tentunya juga diwarnai oleh budaya masyarakat saat itu.

Lambat-laun kultur masyarakat yang telah diwarnai oleh hinduisme dan budhiisme mengalami proses akulturasi. Proses akulturasi budaya dan agama yang dalam waktu panjang menyebabkan kesulitan untuk memisahkan mana unsur budaya dan mana unsur agama, hal ini dikarenakan keduanya saling mengisi. Manusia tidak dapat beragama tanpa budaya, karena kebudayaan merupakan kreativitas manusia yang bisa menjadi salah satu bentuk ekspresi keberagamaan.¹²

⁸ Pluralisme berasal dari kata "plural" yang berarti banyak atau berbilang atau "bentuk kata yang digunakan untuk menunjukkan lebih daripada satu" (*form of word used with reference to more than one*) Pluralisme dalam filsafat adalah pandangan yang melihat dunia terdiri dari banyak makhluk. Istilah ini sering dilawankan dengan monotheisme yang menekankan kesatuan dalam banyak hal atau dualisme yang melihat dunia terdiri dari dua hal yang berbeda. Monoisme terbagi kepada *physicamonoism* yang terwujud dalam filsafat materialisme bahwa seluruh alam adalah benda dan menfa/dualisme, segala sesuatu dilihat sebagai dua. Filsafat Zoroaster misalnya, melihat dunia terbagi kepada gelap dan terang, dan Descartes mempertentangkan antara pikiran (*mind*) dan benda (*mater*). Pada Pluralisme, segala hal dilihat sebagai banyak. Lihat: A.S. Hornby et.al. 1927, *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* .Oxford : Oxford University Press , hal. 744

⁹ M. Amin Abdullah. 1999, "Relevansi Studi Agama di Era Pluralisme Agama", Dalam Kata Pengantar buku Muhammad Sabri, *Keberagamaan yang Saling Menyapa: Perspektif Filsafat Perenial*. Yogyakarta: Bigraf, hal.ix-x.

¹⁰ Budhi Munawar Rachman. 2000, "Pluralisme dan Inklusivisme dalam Wacana Keberagamaan:Upaya Mencegah Konflik Antaragama", dalam, Syifaul Arifin dkk., (ed.), *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, Jakarta : PP Ikatan Remaja Muhammadiyah, Pustaka Pelajar dan The Asia Foundation, hal. 109-110.

¹¹ Agama mempunyai kontribusi yang berpengaruh terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, *truth claim* atas nama agama sering dijadikan alasan kuat terjadinya konflik yang berkepanjangan misal: dari kerusuhan Poso, Ambon dan berbagai daerah di Indonesia. Hal ini memerlukan solusi dan perhatian dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat), dengan harapan kerusuhan dan konflik tidak terjadi lagi. Kerusuhan dan kekerasan dengan mengatasnamakan agama atau dengan alasan apapun sangat bertentangan dengan nilai-nilai normatif yang ada dalam agama. Bukti ini menunjukkan bahwa masing-masing pemeluk agama belum secara penuh mengaplikasikan ajaran agamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Semua agama melarang kekerasan, pembunuhan serta menganjurkan sikap toleransi dan kasih sayang.

¹² Umaruddin Masdar. 1998, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar , him. 139

Menghadapi pelbagai ketimpangan sosial yang ada di Indonesia dewasa ini, seperti konflik, kekerasan, KKN, *illegal logging*, *illegal fishing* dan bencana alam, agama-agama bukannya memainkan peranan profetisnya yang pro-kemanusiaan, justru lebih banyak bermain di domain sosio-politik. Dampaknya agama-agama pun terjebak dalam ketegangan-ketegangan ideologis yang ingin saling menghigemoni dan mendominasi. Secara sosio-historis dalam kehidupan masyarakat plural, agama sebagai kekuatan sosial sering menjadi persoalan.

Kecenderungan suatu agama menjadi ideologis dapat dilihat pada dua gejala. Pertama, kalau agama dalam berhadapan dengan kekuasaan, tidak menjalankan fungsi kritisnya, tetapi lebih menjalankan peranannya sebagai sarana untuk melegitimasi kepentingan dan kekuasaan. Kedua, kalau agama karena tugasnya untuk menyampaikan keselamatan dan mengajarkan kesempurnaan hidup, menjadi instrumen yang ampuh untuk menciptakan hegemoni.¹³

Pada titik itu, ideologisasi agama merupakan suatu alat yang ampuh untuk menciptakan hegemoni, karena ideologi adalah suatu jenis pengetahuan khusus yang ditandai oleh sifat-sifatnya yang menyeluruh dan mengikat, dan memintakan komitmen.¹⁴ Di sinilah agama-agama dan pengikutnya sering berhadapan untuk saling mendominasi melalui pengetahuan dan keyakinan yang diperoleh dari agama-agama tersebut. Dari sikap dominasi di dalam beragama ini melahirkan sikap *truth claim* dan *salvation claim* satu agama kepada agama yang lain.

Klaim-klaim kebenaran dan keselamatan seperti itu, membuat agama-agama terjebak pada eksklusivitas serta sibuk untuk mencari keselamatan individu—dengan cara mengkafirkan dan mengeksploitasi orang lain. Keterjebakan agama-agama pada domain inimengakibatkan agama kehilangan nuansa spiritual dan profetiknya. Padahal domain ini merupakan esensi dari universalitas agama-agama, serta pada spiritualitas agama-agama itu kemanusiaan menempati posisi puncak dan sentral.

Kekerasan agama yang terjadi pada beberapa tahun terakhir di Indonesia menunjukkan bahwa pluralisme di tanah air belum dipahami dan dihayati

secara sejati oleh masyarakat Indonesia. Kekerasan yang hampir meliputi semua aspek kehidupan (*spiral of violence*) di dalam masyarakat dewasa ini sesungguhnya memperlihatkan betapa signifikan upaya aktualisasi dan sosialisasi pluralisme di Indonesia. Karena dalam realitas kemajemukan tak pernah luput dari konflik.

Pluralisme bukan sekedar mengakui dan mengatakan bahwa manusia atau masyarakat itu majemuk, beraneka ragam, yang terdiri dari pelbagai suku, agama dan bahasa yang hanya terkesan pragmentasi, bukan pluralisme yang sebenarnya. Pada konteks lain pemahaman pluralisme hanya sebagai "kebaikan negatif" (*negative good*), yang hanya sekedar mengatasi dan menyingkirkan fanatisme (*to keep fanaticism*), menjadi tidak sejati dan fungsional. Nurcholish Madjid mengatakan pluralisme harus dipahami sebagai "pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban" (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*). Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya.¹⁵

Pada tataran sosio-politik klasik, Rasulullah meletakkan "Konstitusi Madinah" yang terdiri dari 47 pasal. Salah satunya berisi: "...dan tidak satu pun bangunan dalam lingkungan kanisah dan gereja mereka yang boleh dirusak, begitu pula tidak dibenarkan harta gereja itu masuk untuk membangun mesjid atau rumah orang-orang Muslim. Barang siapa melakukan hal itu...telah melanggar perjanjian Allah dan melawan Rasul". Pasca Rasulullah, Khalifah Pertama, Abu Bakar mewasiatkan kepada tentaranya untuk menjaga keutuhan dan keselamatan "orang-orang sedang beribadah, tempat ibadah (gereja), anak-anak, orang tua dan perempuan". Khalifah Kedua, Umar ibn Khattab melakukan "Perjanjian/piagam Aelia" dengan penduduk Yerusalem, ketika kota itu ditaklukkan. Bahkan Umar melaksanakan shalat di teras gereja.¹⁶

Pengertian dan tujuan pluralisme seperti itu, sebenarnya telah lama menimbulkan perdebatan di kalangan umat beragama. Sampai akhirnya, pembicaraan mengenai pluralisme sempat "menghangat" kembali ketika MUI melalui fatwanya baru-baru ini,

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Budhy Munawar Rachman, *loc cit.*

¹⁶ *Ibid.*

menjadi "tanggung jawab" Allah SWT, dimana kita semua dituntut toleran terhadap orang yang tidak satu dengan keyakinan kita. Bahkan nabi sendiri dilarang untuk memaksa orang kafir untuk masuk Islam. Maka dengan begitu, tidaklah dibenarkan "kita" menunjukkan sikap kekerasan, paksaan, menteror dan menakut-nakuti orang lain dalam beragama.

Pluralisme Keagamaan dalam Lingkungan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia dan keberadaannya banyak memberikan sumbangsihbagi perjalanan bangsa. Mulai dari sebelum penjajahan hingga detik ini masih eksis dengan segenap rentangan yang ada. Meskipun di satu sisi, ada anggapan miring tentang pesantren dan dianggap penghambat pembangunan, kotor, jumud, inklusif, dan sebagainya merupakan kata yang tidak asing. Ternyata justru dari hal itu menjadi sumber rebutan.

Pesantren secara kultural merupakan sebuah lembaga pendidikan yang dilahirkan oleh budaya Indonesia, dan secara historis tidak hanya mengandung makna keislaman, tetapi juga makna keindonesiaan, karena cikal bakalnya sudah ada pada masa Hindu-Buddha. Islam tinggal meneruskan, melestarikan dan mengislamkannya.¹⁷ Pendapat ini diperkuat oleh Karel A. Steenbrink yang menyatakan bahwa secara terminologis dapat dijelaskan bahwa pendidikan pesantren, dilihat dari segi bentuk dan sistemnya, berasal dari India. Sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, sistem tersebut telah dipergunakan secara umum untuk pengajaran agama Hindu di Jawa. Setelah Islam masuk dan tersebar di Jawa, sistem tersebut kemudian diambil oleh Islam¹⁸

Dari segi sikap terhadap tradisi, pesantren dibedakan menjadi pesantren salafi dan khalafi. Jenis salafi adalah jenis pesantren yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikannya. Di pesantren ini, pengajaran pengetahuan umum tidak banyak diberikan, bahkan kadang tidak diberikan sama sekali. Tradisi masa lalu sangat diperhatikan. Pemakaian sistem madrasah hanya untuk memudahkan sistem sorogan seperti yang dilakukan di lembaga-lembaga pengajaran bentuk lama. Pada umumnya, pesantren bentuk inilah yang menggunakan sistem sorogan dan wetonan.¹⁹

"Jika Tuhanmu menghendaki, maka tentunya manusia yang ada di muka bumi ini akan beriman. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia, di luar kesediaan mereka sendiri?"

" Dawam Rahardjo. 1985, *Pergulatan Dunia Pesantren; Membangun dari Bawah* Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), h. 53

¹⁴ Karel A. Steenbrink. 1994, *Pesantren Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun modern*, Terj. Karel A. Steenbrink dan Abdurrahman. Jakarta: LP3ES, h. 22

¹⁹ Zamakhsari Dhofier, 1994, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, h. 37.

Bila dilihat dari lingkungan pesantren yang didiami oleh para santri, yang secara status sosial sangat homogen dan dari latar belakang kehidupan sosial, daerah, kepribadian, dan lain-lain, maka masyarakat pesantren sebenarnya merupakan gambaran nyata atau miniatur kehidupan bermasyarakat dalam Islam. Di tengah kemajemukan itu, muncul refleksi senasib sepenanggungan, kepedulian sosial, dan rasa kebersamaan yang tinggi.²⁰

Dari hasil penelusuran peneliti, ditemukan bahwa para pembina dan santri di pondok-pondok pesantren di kabupaten Bone telah '*familiar*' dan mengenai istilah pluralisme, meski pada tingkat wacana filosofisnya belum dipahami secara mendalam oleh para santri. Mereka memahami dengan baik pluralitas, sebagai suatu realitas atau sifat sesuatu yang menunjukkan kemajemukan atau keragaman, dan pluralisme keagamaan sebagai suatu paham atau sikap terhadap realitas kemajemukan keagamaan.

Fathurrahman, pimpinan Pondok Pesantren Al-Junaediyyah Biru, menyepakati bahwa kemajemukan dan keberagaman merupakan sunnatulkh yang ditetapkan Allah SWT pada segenap makhluk-Nya. Tidak ada satu pun makhluk yang sama persis dengan lainnya. Manusia diciptakan dengan perbedaan-perbedaan antara satu sama lain. Akidah Islam menegaskan bahwa hanya Allah satu-satunya yang Esa, tunggal dan tidak majemuk. Kemajemukan makhluk pada dasarnya menunjukkan ke-Esa-an *al-Khaliq*.²¹

Hal yang senada dikemukakan oleh Lukman Arake, Wakil Direktur Pondok Pesantren al-Ikhlas Ujung. Menurutnya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan ras, etnis, suku, bahasa dan agama (kepercayaan) merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa pluralitas merupakan sifat dasar kehidupan di alam ini. Menyatukan dan menyeragamkan keseluruhan perbedaan-perbedaan itu dalam satu bahasa atau agama misalnya, pada hakikatnya bertentangan dengan sunnatullah (hukum alam) dan kemanusiaan.²²

Pluralisme adalah "berkah" sosiologis abad ke-20, di mana kekuatan-kekuatan dominasi lama telah mati. Pluralisme berarti pengakuan adanya pengalaman dan keunikan pada setiap individu dan kelompok yang

berbeda dari yang lain. Aspek unik dari pengalaman adalah sebuah ukuran tentang kekonkretan Tuhan bagi kita, dan ia "tak bisa direduksi, tidak terbandingkan, dan tidak bisa diukur dengan parameter pemahaman apapun". Ia adalah pengejawantahan dari fakta bahwa "kebenaran religius bersifat eksistensial dan *non-objectifiable*". Pengalaman religius adalah tidak terlukiskan dan tidak terkatakan karena Tuhan melampaui seluruh kekuatan media simbolik untuk diekspresikan.²³

Baik Fathurrahman dan Lukman Arake, masing-masing berpandangan bahwa setiap agama, bagaimanapun bentuknya, memiliki dan meyakini konsep kebenaran (*truth*) yang terkandung pada ajarannya masing-masing. Dengan kata lain, setiap agama adalah benar menurut pemeluknya masing. Ajaran Islam benar menurut orang muslim, ajaran Kristen benar menurut umat kristiani, ajaran Buddha benar menurut orang Buddhis dan seterusnya. Satu agama tidak berhak mengingkari kebenaran dan menyalahkan kepercayaan penganut agama lain. Namun di sisi lain, setiap pemeluk agama wajib meyakini dan berpegang pada kebenaran agama yang dianutnya.

Secara konstitusional, negara mengakui keberadaan beberapa agama di Indonesia dan menjamin kebebasan setiap pemeluk agama-agama tersebut untuk menjalankan ajaran agama masing-masing. Dalam sejarah Islam, Rasulullah saw juga memberikan hak hidup dan beragama kepada agama Yahudi dan Nasrani di dalam wilayah negara Islam Madinah ketika itu. Hal itu berimplikasi bahwa setiap agama dan kepercayaan mesti diakui keberadaannya dan berhak secara konstitusional untuk melaksanakan ajarannya.

Secara ideologis, pondok pesantren di Kabupaten Bone menanamkan kepada santrinya sikap toleransi dan keterbukaan pada perbedaan agama. Muallim, salah seorang pembina Pondok Pesantren al-Junaediyyah, menyatakan bahwa sangat tidak benar pandangan bahwa Allah SWT sebenarnya hanya menginginkan satu agama saja yang wajib dianut oleh seluruh manusia, sehingga segala bentuk kepercayaan dan agama yang dianggap bukan agama Allah adalah batil, kafir dan harus dihapuskan dari muka bumi.²⁴

²⁰ Zubaidi Habibullah Asy'ari.1960, *Moralitas Pendidikan Pesantren*. Yogyakarta: LKPSM, 1996, h. 24-25.

²¹ Fathurrahman, Pimpinan Pondok Pesantren al-Junaediyyah Biru Kabupaten Bone, *Wawancara* di Bone, 20 Desember 2010.

²² Lukman Arake, Wakil Direktur Pondok Pesantren al-Ikhlas Ujung Kabupaten Bone, *Wawancara* di Bone, 21 Desember 2010.

²³ Muhammad Muntahibun Nafis, *Pesantren dan Pluralisme; Upaya Modernisasi Pendidikan Pesantren Menuju Masyarakat Madani*, dalam *Jurnal Insania*, Vol. 13, No. 2 Mei-Agustus 2008, h. 11.

²⁴ Muallim, Pembina Pondok Pesantren al-Junaediyyah Biru, *Wawancara* di Bone, 20 Desember 2010.

Sebab hal tersebut bertolak belakang dengan hikmah penciptaan manusia dan keadilan Allah SWT sendiri.

Dalam kaitannya dengan eksistensi hukum agama dalam masyarakat multi-agama seperti Indonesia, baik Fathurrahman maupun Lukman Arake mengakui bahwa setiap agama secara umum memiliki ideologi dan tata hukum sendiri untuk diamalkan oleh penganutnya. Namun, keduanya menolak dengan tegas asumsi yang mendiskreditkan ideologi dan sistem hukum agama lain, bahwa semua tata hukum yang tidak berdasar pada wahyu (baca: Al-Qur'an) adalah batil, kezaliman dan kekafiran. Sehingga tata hukum dan nilai agama lain harus ditolak dan pada akhirnya hanya hukum Islam lah satu-satunya yang harus ditegakkan, meski bertentangan dengan kepentingan atau bahkan merugikan kemaslahatan penganut agama lain.

Menurut Lukman, pada dasarnya setiap agama bertujuan mewujudkan kebaikan dan keselamatan bagi penganut-penganutnya. Makayang perlu ditumbuhkan pada setiap muslim, khususnya generasi muda Islam, adalah kesediaan untuk bekerja sama dan berinteraksi dengan penganut agama lain dalam mewujudkan kedamaian dan kebaikan bersama, sebagai aplikasi dari seruan al- Qur'an untuk bersatu dalam *kalimat sawd*.

Yang menarik, seluruh informan yang sempat diwawancarai peneliti, baik pembina maupun santri menyatakan kesediaan dan keterbukaan mereka untuk melakukan interaksi sosial dan ekonomi dengan penganut agama lain. Namun, meski dalam sejarah Islam diakui adanya golongan *ahl al-Kitab* yang halal dinikahi dan adanya pernikahan Nabi SAW dengan wanita *ahl al-Kitab*, mereka tidak setuju dengan pernikahan antar agama. ini merupakan indikasi bahwa wacana dan fenomena pernikahan beda agama masih merupakan persoalan yang sangat krusial di lingkungan pesantren di Bone.

Menyikapi keragaman dan perbedaan dalam memahami hukum agama, kalangan pesantren di Kabupaten Bone terlihat mengedepankan keterbukaan dan jauh dari kesan radikal dan *rigid*. Menurut mereka, dalam Islam terdapat pluralitas (kemajemukan) pemahaman terhadap ajaran Islam sendiri. Penafsiran al- Qur'an sangat beragam, baik dari segi metode, mazhab, corak maupun cara pandang para penafsir. Dalam bidang fikih, kita mengenal beberapa mazhab

fikih yang diakui. Dalam teologi (ilmu Kalam), muncul bermacam-macam aliran/sekte yang mengemukakan pendapat yang acapkali bertentangan satu sama lain. Ini memberi arti bahwa dalam internal Islam sendiri terdapat keberagaman pemahaman yang tidak mungkin disatukan.

Jika demikian halnya, maka setiap mazhab, aliran dan bahkan individu tidak boleh mengklaim dirinya sebagai golongan yang paling benar dalam memahami ajaran Islam yang dipresentasikan dalam nas-nas wahyu dari TuhanYang Maha Mutlak. Setiap golongan atau individu harus mengakui bahwa kebenaran dan kekeliruan mungkin ada pada setiap orang dalam memahami ajaran agamanya. Imam Syafi'i bukanlah yang paling benar dibandingkan Imam Hanafi atau Hambali, demikian pula sebaliknya. NU tidaklah merupakan kelompok agama yang lebih benar dari Muhammadiyah atau Persis. Para pembina pondok pesantren mengungkapkan bahwa hal yang perlu diwujudkan adalah kesepahaman dan dialog yang terbuka antar semua golongan.

Seperti yang diungkap Nandar Tri Jay a, seorang muslim tidak seyogyanya berpandangan negatif terhadap perbedaan interpretasi atau cara pengamalan agama. Memandang bahwa orang atau golongan yang berpandangan berbeda dalam memahami hukum Islam adalah fasik atau bahkan kafir, bukan Islam yang sebenarnya, sehingga kita tidak akan bermamum kepada imam dari golongan Islam yang lain, meski mereka tetap bersyahadat kepada Allah, adalah sikap yang sangat keliru.²⁵

Dalam lingkungan Pondok Pesantren al-Ikhlash, Nandar membangun pluralisme sebagai sikap dasar dalam memahami agama. Menurutnya, dalam menyikapi perbedaan dan kemajemukan pemahaman agama, santri perlu mengedepankan sikap rasional (tidak emosional), terbuka untuk memahami kebenaran pendapat orang lain, dan menjadikan nilai-nilai substansial (seperti *mashlahah*, *al-'adl*, *tawassuth* dan sebagainya) sebagai pijakan dasar dalam mencapai kebenaran.

Upaya pembentukan pola pikir dan pola sikap pluralistik di pesantren tersebut dilakukan dengan cara berikut:

- 1) Memberi kebebasan kepada para santri dalam mengemukakan pendapat.

²⁵ Nandar Tri Jaya, Pembina Pondok Pesantren al-Ikhlash Ujung Bone, *Wawancara di Bone 21 Desember 2010*.

- 2) Mengarahkan santri untuk memahami pendapat orang lain.
- 3) Mengajak para santri untuk berdialog, khususnya non muslim dan pihak yang berbeda paham dengan mereka. Dialog ini tidak dilakukan dengan tujuan menciptakan pertikaian, perdebatan panas, emosional yang memunculkan egoisme, tetapi ditujukan untuk mendidik para santri memahami dan toleran kepada siapapun yang berbeda paham darinya.²⁶

Ditinjau dari perspektif sosiologi pendidikan, pesantren dapat dikategorikan ke dalam dua hal, yaitu *pertama*, pesantren sebagai lembaga yang dapat berperan sebagai *social change*; sebuah lembaga yang dapat mengubah struktur-struktur ide dan pemikiran dalam masyarakat. *Kedua*, pesantren merupakan lembaga yang dapat berperan sebagai *culture change*; sebuah lembaga yang dapat mengubah berbagai budaya yang ada dalam masyarakat.²⁷

Terkait dengan pluralisme, maka pesantren pada awalnya dapat menjadi keduanya. Dalam dataran pertama, pluralisme dapat dikembangkan dalam sebuah ide dan pemikiran kiai, ustazd, dan para santri. Sarana yang efektif untuk penanaman nilai ini adalah melalui proses pembelajaran dan pendidikan.

Tentunya yang paling memungkinkan dan memudahkan untuk dilaksanakan adalah melalui kebijakan dan kurikulum yang disusun. Pada dataran kedua, pesantren dapat menanamkan dan mengembangkan pluralisme dengan semakin sering bercengkerama dan kenal akan nilai-nilai pluralisme. Pembiasaan-pembiasaan dunia pesantren dengan orang yang di luar agama dan kayakinannya akan menumbuhkan budaya pesantren yang pluralis. Suatu misal, santri sering diajak bergaul dan berdialog dengan "the other" sehingga akan terbangun paradigma yang lebih *open minded*. Hal-hal seperti ini yang nantinya akan mengubah pemikiran dan budaya yang eksklusif menjadi lebih inklusif.

Pada dasarnya pondok pesantren bukanlah merupakan lembaga yang bertujuan mencetak generasi muslim yang keras, radikal, kaku, berpandangan sempit dan tidak mau menerima kebenaran dari pihak lain. Hal ini disetujui oleh Fathurrahman. Dalam pandangannya, Pendidikan Islam secara umum bertujuan menciptakan insan

muslim yang beriman dan bertakwa, cerdas, terampil dan mampu hidup bermasyarakat dalam suasana demokratis dan terbuka. Karena itu, Pondok pesantren sangat tepat melakukan internalisasi nilai-nilai sosial, di antaranya adalah pluralisme sebagai sikap atau paham yang menerima perbedaan-perbedaan dan memandang keragaman sebagai jalan mencapai kebaikan bersama.

Hal tersebut dibuktikan dengan kondisi sosiologis santri di Pondok Pesantren Biru. Sesuai dengan penuturan Fathurrahman selaku pengasuh Pondok Pesantren, dan pengamatan langsung oleh peneliti, para santri telah menampilkan cara hidup dan cara pandang pluralistic, dengan tidak menciptakan konflik antar mereka atas dasar perbedaan suku, bahasa dan pemahaman.

Secara struktur sosial, pesantren memang masih terkesan tidak mendukung tertanamnya nilai pluralisme, namun hal ini bukan berarti tidak bisa diubah. Antara ide dan budaya yang berkembang di pesantren dapat diusahakan terjadinya proses transformasi. Dalam hal ini, sudah mulai terjadi kecenderungan dan indikasi-indikasi yang menuju ke sana. Beberapa pesantren sudah mulai melakukan berbagai inovasi dan kreasi yang mengarah pada penanaman nilai-nilai pluralisme di pesantren. Salah satu yang dapat dianalisis adalah adanya fenomena pesantren yang telah menjadi pusat kajian dan dialog antaragama dan agama-agama di tanah air. Ada beberapa tenaga pengajar yang dapat masuk dan mendidik di pendidikan formal yang dimiliki pesantren.

Kalaupun terjadi transformasi atau perubahan pada pesantren terkait dengan penanaman nilai-nilai modernisasi, seperti demokratisasi, inklusivisme, dan pluralisme secara substantif tidak akan mempengaruhi *identity* dan eksistensi pesantren selama ini. Pesantren tidak akan kehilangan sesuatu yang vital dan urgen ketika terjadi rekonstruksi nalar dan budaya pesantren. Oleh karena itu, perubahan tersebut hanya menyentuh dimensi "badan" pesantren yang berjalan dengan perlahan dan tidak radikal atau destruktif. Hal ini malah menjadikan proses dinamisasi pesantren dapat berjalan dengan baik.

Dalam penerapan pluralisme di pesantren, ditinjau dari segi sosiologis terdapat kemungkinan akan adanya yang disebut *pluralisme-dogmatis*, bukan *pluralisme-*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Nafis, *op. cit*, h.111.

aplikatif. Maksudnya, bahwa pluralisme yang berkembang hanya karena sosok kiai yang mungkin pluralis sehingga santri merasa harus mengikuti ideologi kiai yang pluralis tersebut. Jadi, santri menerima dan menerapkan pluralisme tidak murni karena memang pengetahuan yang telah dia mengerti dan dapati sendiri atau karena kesadaran sendiri akan perlunya nilai tersebut. Dari sini, maka yang perlu diperhatikan adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran sendiri yang muncul dari santri. Inilah letak pentingnya komunikasi inter dan antar-personal di pesantren yang lebih inklusif dan pluralis dengan lebih familarnya, dengan hal-hal yang di luar agama dan keyakinannya.²⁸

Yuliana Jamaluddin, salah seorang santriwati Pondok Pesantren al Junaediyyah Biru, mengakui adanya nilai-nilai pluralisme yang terbentuk di pesantren, meski tidak mesti relevan dengan konsep paham pluralisme *ala* Barat. Ia mengungkapkan bahwa materi dan sistem pembelajaran agama di pondok pesantrennya sangat mendukung pembentukan dan penanaman nilai-nilai pluralisme pada santri, yang nantinya berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakatnya.²⁹

Hal yang sama dikemukakan oleh Iswahyudi, santri Pondok Pesantren al-Ikhlas Ujung. Setelah melalui pendidikan di pesantren, ia mulai memahami bahwa seorang muslim tidak seharusnya memandang dirinya berbeda dari penganut agama lain, lebih benar, lebih mulia dan lebih 'selamat' nanti di Hari Kemudian, padahal umat lain juga melakukan kebaikan dan membenci keburukan, sebagaimana umat Islam. Secara terbuka, Iswahyudi menyatakan dirinya bersedia dan membuka diri untuk berteman dengan pemeluk agama lain, sepanjang tidak melakukan hal-hal yang melanggar ajaran Islam.³⁰

Selanjutnya, menurut Iswahyudi maupun Yuliana, perbedaan interpretasi nas agama yang berujung pada keragaman pengamalan sebenarnya merupakan kekayaan ajaran Islam, bukan faktor pemecah umat. Jika kita misalnya, melakukan shalat tarawih 20 rakaat, sedang teman yang lain melakukannya dengan 8 rakaat, kita tidak perlu menganggap mereka melanggar aturan agama atau melakukan 'dosa'. Sebab kedua pendapat tersebut masing-masing diperkuat oleh dalil-dalil yang dipandang kuat oleh penganutnya. Sikap pluralistik seperti inilah yang perlu terpelihara dalam sistem pembinaan keagamaan di pondok pesantren.

Adanya solidaritas, persaudaraan, serta komitmen yang kuat dan tinggi dunia pesantren merupakan modal tersendiri bagi aplikasi nilai pluralisme. Struktur sosial pesantren harus diusahakan dapat mendukung proses transformasi sikap dan spirit pluralisme karena pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan dengan struktur dan kultur sosial yang unik, yang telah membentuk sistem komunikasi inter dan antar-personal tersendiri.

Inilah nantinya yang akan dapat mendukung dan membantu terlaksananya cita-cita bersama yang diidam-idamkan negara ini, bahkan masyarakat dunia, yakni terwujudnya masyarakat madani, walaupun hanya sebatas terimplementasikannya nilai dan spirit yang terkandung dalam bangunan masyarakat adil dan demokratis seperti pluralisme.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis tentang Pluralisme Keagamaan pada Pondok Pesantren di Kabupaten Bone dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam konteks Islam Indonesia, pluralisme bukanlah relativisme sebagaimana sangkaan beberapa pihak atau mengatakan semua agama adalah sama dan relatif, sehingga setiap orang dapat menolak kebenaran mutlak pada setiap agama. Ajaran ini tidak perlu diartikan sebagai secara langsung pengakuan akan kebenaran semua agama dalam bentuknya yang nyata sehari-hari, akan tetapi ajaran kemajemukan keagamaan itu menandakan pengertian dasar bahwa setiap agama dan pemahaman keagamaan berhak dan bebas hidup serta berekspresi sebagai jalan keselamatan dan kebenaran, yang pada akhirnya akan bertemu pada *common platform* yaitu *kalimatun sawa*.
2. Pesantren dalam peranannya sebagai *social change*; sebuah lembaga yang dapat mengubah struktur-struktur ide dan pemikiran dalam masyarakat dan sebagai *culture change*; sebuah lembaga yang dapat mengubah berbagai budaya yang ada dalam masyarakat, maka pesantren dipandang sangat berperan dalam membentuk masyarakat pluralis. Dalam hal ini, pluralisme di

²⁸ *Ibid.*, h. 12.

²⁹ Yuliana Jamaluddin, santriwati Pondok Pesantren al Junaediyyah Biru, *Wawancara* di Bone, 20 Desember 2010.

³⁰ Iswahyudi, santri Pondok Pesantren al-Ikhlas Ujung, *Wawancara* di Bone, 21 Desember 2010.

Pondok Pesantren di Kabupaten Bone telah dikembangkan dalam sebuah ide dan pemikiran kiai, ustazd, dan para santri. Sarana yang efektif untuk penanaman nilai ini adalah melalui proses pembelajaran dan pendidikan. Pola hidup dan tradisi keilmuan yang akrab dengan perbedaan dan kemajemukan pemikiran pada kenyataannya menumbuhkan budaya kepesantrenan yang pluralis.

Saran-saran

1. Untuk mencapai masyarakat yang berperadaban, tentunya perlu mengedepankan sikap keterbukaan dalam kondisi masyarakat yang amat plural. Agama-agama lain bukanlah merupakan komunitas 'saingan' ataupun lawan, namun justru semestinya menjadi wahana pembelajaran untuk memahami perbedaan dan mencari titik persamaan antar agama.
2. Konsepsi pendidikan Islam bukanlah corpus tertutup dan dogmatis, tapi semestinya dapat membuka diri pada wacana dan perkembangan pemikiran yang ada, sehingga pesantren dapat mewujudkan dirinya sebagai agen pembaharuan sosial sekaligus agen penciptaan masyarakat muslim yang toleran, terbuka, demokratis dan pluralis.

Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini bisa selesai atas bantuan berbagi pihak, khususnya dari pesantren yang diteliti. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Pesantren Junaid Biru dan al-Ikhlas Ujung Kab. Bone.

- Fernando, Ajith, 1995. "Other Religions are False Paths that Mislead Their Followers" dalam John Lyden, *Enduring Issue in Religion*, San Diego: Greenhaven Press Inc.
- Ka'bah, Riyal, 2005. *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam*, Bingkai gagasan yang berserak, (Ed.) Surui, Bandung : Penerbit Nuansa.
- Kleden, Ignas, 2000. *Kekuasaan, Ideologi dan Peran Agama-Agama*, dalam Olef Schumann dkk, *Agama-Agama Memasuki Milenium Ketiga* Cet. I; Jakarta: PT. Grasindo.
- Madjid, Nurcholish, 2000. *Islam, Doktrin dan Peradaban* Cet. IV, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina,
- Madjid, Nurcholish,. "Masyarakat Madani dan inventasi Demokrasi : Tantangan dan Kemungkinan", *Republik*, 10 Agustus1999.
- Marsen, Martin H, 1999. *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Oxford University, Second Edition.
- Masdar, Umaruddin, 1998. *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachman, Budhy Munawar, "Membincangkan Kembali Pluralisme Agama" (Diskursus Pemikiran Agama dan Kemajemukan Agama), <http://id.acehinstitute.org>. diakses tanggal 25 April 2010
- Rahardjo, Dawam, 1985. *Pergulatan Dunia Pesantren; Membangun dari Bawah*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat P3M.
- Sealy, Jhon, 1986. *Religious Education Philosophical Perspective*, London: George Allen & Ullin.
- Shihab, Alwi, 1997. *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan,
- Steenbrink, Karel A., 1994, *Pesantren Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun modern*, Terj. Karel A. Steenbrink dan Abdurrahman, Jakarta: LP3ES.
- Thoha, Anis Malik, 2005. *Tren Pluralisme Agama, Tinjauan Kritis*, Jakarta: Perspektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, 1999. *Relevansi Studi Agama di Era Pluralisme Agama*, Kata Pengantar buku yang ditulis Muhammad Sabri, *Keberagaman yang Saling Menyapa: Perspektif Filsafat Perennial*, Bigraf, Yogyakarta.
- Arifin, Syifaul dkk., (ed), 2000. *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, PP Ikatan Remaja Muhammadiyah, Pustaka Pelajar dan The Asia Foundation,
- Asy'ari, Zubaidi Habibullah, *996 Moralitas Pendidikan Pesantren*, Yogyakarta. LKPSM.
- Dhofier, Zamakhsari, 1994. *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES.